
ISLAMIC EDUCATION AND CIVIL SOCIETY

Iwan Ridwan, Siti Muhibah, Ima Maisaroh, Istinganatul Ngulwiyah

Dosen Pendidikan Agama Islam
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
iwanridwan@untirta.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat Madani merupakan wacana yang sedang dikembangkan pada era reformasi sekarang ini. Civil Soceity atau dalam istilah lain masyarakat madani menjadi penting untuk dijadikan sebuah usulan perubahan yang dicita-citakan semua bangsa. Bangunan masyarakat madani membutuhkan berbagai material yang kokoh dan tangguh yang berlandaskan pada pondasi agama. Kunci bangunan tersebut adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai upaya mencetak generasi unggul yang Islami yang nantinya akan mempersatukan diri membentuk masyarakat yang religious, bermoral, memiliki kualitas tinggi dan kreatif dalam membangun peradaban.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan konsep, gagasan dan pola pendidikan Islam dalam masyarakat madani di Indonesia. Di samping itu tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis tentang pendidikan Islam yang difokuskan pada tujuan dan materi pendidikannya yang dapat berperan dalam membangun masyarakat madani, yaitu tujuan dan materi pendidikan Islam yang dapat membentuk manusia-manusia yang berkarakter sebagaimana yang tercakup dalam ciri-ciri masyarakat madani yakni masyarakat yang beradab, memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan studi atau telaah terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang menjadi rujukan utama serta buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

Keyword : *Pendidikan Islam, Civil Society*

PENDAHULUAN

Sudah dua dekade era reformasi berlangsung di Negara ini pasca Soeharto lengser keprabon pada 21 Mei 1998 dari jabatannya sebagai presiden. Kurang lebih 32 tahun sudah Soeharto berkuasa di era yang sering disebut oleh banyak kalangan sebagai masa orde baru. Runtuhnya masa orde baru ini disebabkan oleh beberapa hal yang melatarbelakanginya. Diantaranya masyarakat dibatasi ruang geraknya melalui kebijakan-kebijakan negara yang berimplikasi pada sendi kehidupan politik. Selain itu, karakter negara orde baru yang otoriter menyebabkan demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti apa yang dicita-citakan para *Founding Father* bangsa ini.

Di Negara manapun pendidikan adalah merupakan aspek penting dan tidak terpisahkan dari program pembangunan. Bagaimana tidak pendidikan merupakan sebuah proses yang menyiapkan sumber daya manusia untuk dapat memiliki kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan suatu negara. Kemajuan dan kemunduran sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang

dimilikinya. Dan ini tidak lepas dari tugas bidang pendidikan yang menyiapkannya.

Perlu diketahui sesungguhnya keberhasilan sebuah kebijakan dan program pembangunan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan program dan kebijakan tersebut, dan ini tentu harus didukung oleh pendidikan. Tingkat kualitas partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Di samping itu, pendidikan juga dipahami sebagai sebuah proses penyiapan warga negara untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Semua ini tidak lepas dari kemampuan bidang pendidikan untuk mencapai tujuannya yaitu mempersiapkan anak didik untuk dapat menjadi warga negara yang baik yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk berperan serta secara proaktif dalam pembangunan.

Pendidikan sejatinya harus bermuara pada pembentukan masyarakat madani. Istilah *Civil Society* identik dengan masyarakat berbudaya oleh Thomas Hobbes dinilai sebagai sebuah konsep masyarakat yang merujuk kepada masyarakat yang saling menghargai nilai-

nilai sosial kemanusiaan (termasuk dalam kehidupan politik) yang sarat dengan nilai dan aturan hukum yang memberlakukan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka upaya penegakkan nilai-nilai sosial yang positif dalam masyarakat dapat dijaga dan diwariskan. Jika proses pendidikan itu berjalan dengan baik, bagaimanapun juga pencapaian tujuan pendidikan sesungguhnya terkait erat dengan tujuan pembentukan masyarakat madani yang berusaha menegakkan dan menjaga nilai-nilai sosial kemanusiaan dalam masyarakat.

Pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, maka Islam sebagai Agama yang *Rahmatan Lil 'Alamin*, memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia. Seiring dengan adanya perkembangan globalisasi yang sedang berlangsung saat ini, mau tidak mau ada dampak bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi telah membatasi habis batas-batas yang mengisolasi kehidupan

manusia. Karena itu, lahirlah masyarakat yang terbuka (*open society*), dimana terjadi aliran bebas informasi, yakni manusia, perdagangan, serta berbagai bentuk-bentuk aktivitas kehidupan global lainnya yang dapat menyatukan manusia dari berbagai penjuru dunia. Karena itu, masyarakat Indonesia mempunyai karakter tersendiri yang menjadi ciri khas dan berbeda dengan negara lain-nya, antara lain; 1) keberagaman, 2) sikap saling pengertian, 3) toleransi 4) sanksi moral.¹Karakteristik ini diharapkan dapat mewarnai kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sehingga dapat melahirkan masyarakat madani.

Demikian Islam sebagai agama menduduki posisi sentral dalam kehidupan miliaran, dan terbukti tangguh menghadapi gempuran baik atheisme maupun sekularisme. Namun, perwujudan sebagai sebuah peradaban tengah mengalami krisis monumental. Bertubi-tubi peradaban Islam menerima pukulan yang menggoyahkan, terutama ekspansi dari Barat, modernitas dan terakhir adalah globalisasi. Di tengah perkembangan zaman, fenomena perilaku amoral peserta

¹ Ismatul Izzah, *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Masyarakat Madani*, Jurnal Pedagogik; Vol. 05, No. 01. Januari-Juni

didik yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti seks bebas, kekerasan, pornografi, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, tawuran, *bullying* baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap guru maupun teman sebaya, Beberapa *impact* yang lahir sejalan dengan arus globalisasi meliputi; 1) kecenderungan negatif generasi muda dalam interaksi sosial, (2) melemahnya rasa sosial dan empati, dan (3) maraknya konflik sosial di masyarakat. Bahkan beberapa kasus seperti korupsi dan manipulasi yang prevalensinya banyak melibatkan orang-orang terdidik dan terpelajar, hal ini menjadi teguran keras dunia pendidikan yang seharusnya melahirkan generasi-generasi terdidik dan beretika.

Berdasarkan keterangan tersebut, dunia pendidikan saat ini berusaha mengevaluasi sistem pembelajarannya untuk menghasilkan manusia berkarakter. Proses pencarian jati diri sistem pendidikan di Indonesia yang merupakan arah untuk mencapai keseimbangan atau kondisi *homeostatic* yang relatif sebagaimana setiap manusia mempunyai

keinginan untuk mencapainya. Di sinilah peran sekolah, madrasah, dan guru sebagai institusi pendidikan formal sebagai posisi yang tertantang dalam menghadapi fenomena yang berkaitan dengan globalisasi dan degradasi moral dalam mewujudkan masyarakat madani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi, dan berbagai macam data- data lainnya yang terdapat dalam kepustakaan.² Dengan mengutarakan jenis penelitian ini, fokus dan langkah-langkah yang akan dalam penelitian ini menjadi semakin jelas. Mengenai sumber data, karena tulisan ini sifatnya adalah kajian pustaka, maka obyek yang dapat dijadikan sumber dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah adalah buku, jurnal, buletin dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masyarakat madani. Sedangkan data sekunder adalah buku buku masih

² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, hal. 19.

dianggap relevan dengan kajian penelitian.³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis digunakan untuk merumuskan secara jelas hakekat yang mendasari konsep-konsep pemikiran. Sementara teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data tentang variabel penelitian dari berbagai macam dokumentasi, baik yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Untuk mengarahkan keakuratan dan ketepatan terhadap data yang diteliti, metode analisa yang digunakan yaitu *content analysis*.

Metode *content analysis* merupakan sebuah analisis terhadap kandungan isi yang tidak akan lepas dari interpretasi sebuah karya. Secara metodologis, analisis ini mencoba menawarkan asumsi-asumsi epistemologis terhadap pemahaman yang

tidak hanya berfokus pada analisa teks tetapi juga menekankan pada konteks yang melingkupinya serta kontekstualisasinya dalam masa yang berbeda.

PEMBAHASAN

A. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.⁴ Kemudian dalam makna yang lain bahwa Pendidikan Islam adalah adalah pembentukan kepribadian muslim, atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Dan Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya (*kaffah*), mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani.⁵

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Bina Usaha, 1993, hal. 131

⁴ Omar Mohammad At-toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta : PT : Bulan Bintang 1979, hal. 399

⁵ Hasan Baharun, *Pengembangan Kurikulum : Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI)*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017, hal. 88

Pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan serta panca indera yang dimilikinya. Dan adapun tujuan akhir pendidikan adalah pembentukkan tingkah laku Islami (akhlak mulia) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis).⁶

Pendidikan Islam adalah suatu proses mempersiapkan generasi penerus untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Pendidikan Islam dalam pengertian di atas merupakan suatu proses pembentukan individu

berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad melalui proses dimana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi, sehingga mampu menunaikan tugasnya sebagai kholifah di bumi yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Beberapa konsep pendidikan Islam diantaranya ialah *Tarbiyah*, *Ta'lim*, *Ta'dib*. menurut kamus bahasa arab lafadz *At-Tarbiyah* berasal dari tiga kata yaitu yang **Pertama**; *Raba-Yarbu* yang berarti bertambah dan bertumbuh, **Kedua**; *Rabiya-Yarba*, kata ini mengikuti wazan *Khafiya-Yakhfa* yang berarti menjadi besar, **Ketiga**; *Rabba-Yarubbu* merupakan kata yang mengikuti wazan *Madda-Yamuddu* yang artinya memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara. Kata *Tarbiyah* merupakan mashdar dari *Rabba-Yurabbiy-Tarbiyatan* dengan mengikuti wazan *Fa'ala-Yaf'ilu-Taf'ilan*. Kata ini ditemukan dalam Al-Qur'an surah al-isra' ayat 24 yang artinya "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh

⁶ Fathul Jannah, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal Dinamika Ilmu, Vol. 13.No. 2, Desember 2013, 164

kesayangan dan ucapkanlah; Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidiku waktu kecil". Dari ketiga asal kata tersebut dapat disimpulkan bahwa Tarbiyah memiliki empat unsur yaitu : menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baligh, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya, proses ini dilaksanakn secara bertahap.⁷

Ta'lim merupakan sebuah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah, sehingga terjadi penyucian atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang bisa memungkinkan untuk menerima *al-Hikmah* serta mempelajari segala yang bermanfaat dan yang tidak diketahuinya.

Pada zaman klasik orang hanya mengenal istilah Ta'dib untuk

mrnunjukkan kegiatan pendidikan. Pengertian ini terus dipakai sepanjang masa kejayaan Islam, hingga semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal manusia pada masa itu disebut adab, baik yang berhubungan langsung dengan Islam maupun tidak. Seorang pendidik pada masa itu disebut *mu'addib*. *Ta'dib* merupakan sebuah pengenalan dan pengakuan yang terjadi secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya.⁸

B. Pendidikan Islam dalam Sejarah

Umat manusia dalam sejarahnya yang panjang sesungguhnya telah memperhatikan pada pentingnya pendidikan Islam. Hal ini dapat ditelusuri sejak masa Rasulullah SAW hingga dewasa ini. Islam adalah agama yang filosofi dasar ajarannya tergambar pada awal ayat yang

⁷ Robiatul Awwaliyah dan Hasan Baharun, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional; Telaah Epistimologi terhadap Problematika Pendidikan Islam*, Jurna Ilmiah

DIDAKTIKA, VOL 19, NO. 1, Agustus, 2018. Hal. 34-39

⁸ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : PT : Sinar Grafika Offset, 2010, hal. 26

diwahyukan kepada Rasulullah yaitu ; “*Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, Bacalah demi Rabbmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak ia ketahui*”. (QS. Al-‘Alaq : 1-5). Wahyu yang pertama diterima Rasulullah memperlihatkan pada pentingnya proses pembelajaran (pendidikan). Kata-kata seperti *اقْرَأِ الْقَلَمِ*, *ما لم يعلم*, dalam surat Al-Alaq merupakan term-term yang menunjukkan pada pendidikan : *اقْرَأِ* menunjukkan pada kegiatan membaca, *الْقَلَمِ* mengisyaratkan pada sarana untuk kegiatan menulis, dan *ما لم يعلم* menunjukkan pada obyek dalam pendidikan. Jadi wahyu ini sangat mendukung terhadap usaha pendidikan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rasulullah, seperti mengadakan *Ta’lim* (pembelajaran) kepada para sahabatnya untuk mengetahui ajaran-ajaran Islam sehingga beliau membuat kompleks belajar *Dar Al-Arqam*, merupakan salah satu bukti perhatian Rasulullah terhadap

pendidikan. Selain itu, kompensasi tawanan perang Badar bahwa bagi tawanan yang pandai baca tulis dapat dibebaskan dengan syarat harus mengajarkan tulis-baca kepada sepuluh orang anak-anak Madinah. Setelah anak-anak itu pandai tulis-baca mereka bebas dari tawanan dan kembali ke negerinya merupakan usaha pertama yang dilakukan Rasulullah dalam memberantas buta huruf dan sekaligus merupakan keputusan yang sangat penting dalam perkembangan dunia pendidikan selanjutnya.⁹

Adapun materi pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah di Mekkah adalah pendidikan keagamaan dan akhlak serta menganjurkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirnya memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan alam semesta, sebagai anjuran kepada pendidikan Akliyah dan Ilmiah. Sedangkan kurikulum pengajaran di Madinah adalah keimanan dan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, dan syari’at yang berhubungan dengan masyarakat.

Kondisi aktivitas belajar baru mengalami perubahan yang berarti ketika

⁹ Ahmad Ghani, *Pendidikan Akhlak Mewujudkan Masyarakat Madani*, Jurnal

Pendidikan Islam, Al-Tadzkiyyah, Vol, 6, November 2015, P. ISSN ; 20869118.

Islam lahir bagi bangsa Arab, Masjid merupakan lembaga pendidikan pertama yang bersifat umum dan sistematis. Di Masjid inilah anak-anak dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan menuntut ilmu. Masjidpun digunakan oleh orang fakir miskin untuk berlindung dari dinginnya udara malam sambil belajar agama dan keduniaan. Selain itu, masjid digunakan untuk bermusyawarah dan sebagainya. Dengan demikian, masjid tidak hanya difungsikan untuk menangani masalah-masalah sosial-kemanusiaan, politik dan sebagainya. Usaha pendidikan ini kemudian ditindak-lanjuti oleh para generasi berikutnya. Pendidikan dan pengajaran terus tumbuh dan berkembang pada masa Khulafa Al-Rasyidin dan masa Bani Umayyah. Pada permulaan masa Abbasiyah pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat hebat di seluruh negara Islam sehingga lahir madrasah- madrasah yang tidak terhitung jumlahnya, bahkan madrasah berdiri dari kota ke desa. Anak-anak dan orang dewasa berlomba menuntut ilmu pengetahuan, melawat ke pusat-pusat pendidikan meninggalkan kampung halamannya. Perkembangan itu, disamping membenahi pada tingkat sarana pendidikan, juga perbaikan pada

tingkat perangkat lunak pendidikan (*Soft Ware of Education*), seperti kurikulum, metodologi dan manajemen.

Perkembangan dunia pendidikan ini mengantarkan umat Islam pada kemajuan yang sangat berarti. Berkembangnya pusat-pusat peradaban yang dipenuhi dengan berbagai kegiatan ilmiah dan Scientific menjadikan posisi umat Islam ketika itu sangat diperhitungkan oleh dunia Barat. Bahkan, tidak sedikit Sarjana Barat melakukan kegiatan pendidikan, misalnya dengan melakukan penerjemahan terhadap sejumlah literature yang ditulis oleh cendekiawan muslim sehingga kemudian mereka kembangkan diwilayahnya masing-masing.

Dalam sejarah Islam di Indonesia, tumbuh dan berkembangnya ajaran Islam adalah tidak terlepas dari jalannya proses pendidikan yang terjadi ketika itu; oleh karena itu, sejarah pendidikan Islam di Indonesia di mulai sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu kurang lebih pada abad ke-12 M. Pada awalnya Islam datang ke daerah Aceh yang kemudian berkembang ke Malaka dan Minangkabau (Sumatra Barat), dari Minangkabau Islam berkembang ke Sulawesi, Ambon, dan sampai Philipina. Kemudian Islam

tersebar ke pulau Jawa, Banten, Lampung, Palembang dan sampai ke seluruh kepulauan Indonesia.

Dalam proses penyebaran Islam itu, pendidikan Islam dikembangkan melalui masjid, langgar atau surau-surau yang tidak memakai kelas, bangku dan papan tulis, hanya duduk bersela saja atau ini dinamakan sistem Halaqah. Sistem pendidikan itu berkembang dengan sistem kelas, memakai meja, bangku dan papan tulis yang kemudian menjadi madrasah-madrasah yang pertama berdiri adalah sekolah adabiyah (*Adabiyah School*) di Padang. Sedangkan di Jawa, pendidikan Islam dikembangkan melalui institusi Pondok- pondok Pesantren (di Sumatra tengah, nama itu dikenal dengan surau atau langgar), murid dan guru tinggal bersama-sama sebagai satu keluarga mereka belajar hidup sendiri dan mandiri.

C. Landasan Yuridis Pendidikan Islam

Setiap bangsa memiliki system pendidikan nasional, pendidikan nasional masing- masing bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaannya. Kebudayaan tersebut sarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang

melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Demikian halnya bangsa Indonesia yang memiliki falsafah Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Dapat dilihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 2003. dari pelbagai Pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama memiliki peran cukup urgen dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional pada Bab. I, pasal 1 ayat (1, 2) dijelaskan : (1) Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar merefleksi kehidupan bangsa, maka sangat penting pendidikan nasional memiliki beberapa landasan yaitu; landasan filosofis, sosiologis, yuridis

dengan penajaman landasan tersebut secara kritis dan fungsional. Landasan Filosofis, Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila yang telah tersebut harus ditanamkan pada tiap-tiap peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkat dan jenis pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan. Lebih jauh lagi pencapaian suatu nilai budaya sebagai landasan filosofis bertujuan mengembangkan bakat serta minat dan kecerdasan dalam pemberdayaan yang seoptimal mungkin.¹⁰

Dua hal yang dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional Indonesia. Pertama, adalah pandangan tentang manusia Indonesia sebagai: (1) Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya (2) Makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya (3) Makhluk sosial dengan segala tanggung jawab yang hidup di dalam masyarakat yang pluralistik baik dari segi lingkungan sosial

¹⁰ Rubino Rubiyanto, dkk, *Landasan Pendidikan*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2003, Hal. 17

budaya, lingkungan hidup dan segi kemajuan Negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya.

Landasan Sosiologis, kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu bahkan dua generasi, yang memungkinkan dari generasi kegenerasi berikutnya mengembangkan diri searah dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat pada zamannya.¹¹ Pendidikan merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarakat.¹²

Landasan Kultural, landasan Pendidikan yang ketiga adalah Landasan Kultural. Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Oleh karena itu dalam Undang-undang RI no. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 telah ditegaskan bahwa, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar

Pancasila dan undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, kebudayaan dapat diwariskan dengan jalan meneruskan kepada generasi penerus melalui pendidikan. Sebaliknya pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat dimana proses pendidikan berlangsung.

Landasan Psikologis, landasan Pendidikan yang keempat adalah landasan Psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Memahami peserta didik dari aspek psikologis merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Sebagai implikasinya pendidikan tidak mungkin memperlakukan sama kepada peserta didik. Penyusunan kurikulum harus berhati-hati dalam menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan

¹¹ Umar Tirtarahardja dan S,L.La Solo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008, hal. 96

¹² Hasan Baharun and Robiatul Awwaliyah, 'Pendidikan Inklusi Bagi Anak

Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam', *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 5.1, 2018, 57-71

garis-garis besar program pengajaran serta tingkat keterincian bahan belajar yang digariskan.

Landasan Ilmiah dan Teknologi, landasan Pendidikan yang kelima adalah Landasan Ilmiah dan Teknologi. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang erat. Seperti diketahui IPTEK menjadi isi kajian di dalam pendidikan dengan kata lain pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Dari sisi lain setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus segera diimplementasikan oleh sistem pendidikan yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan iptek ke dalam isi bahan ajar.

Landasan Yuridis, landasan Pendidikan yang terakhir adalah Landasan Yuridis. Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Hal ini dapat dikatakan sangat urgen karena hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak UUD 1945 utamanya pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam konteks pendidikan

nasional Indonesia, Pendidikan Agama Islam di sekolah mempunyai posisi yang cukup kuat. Dikatakan cukup kuat karena kedudukan pendidikan agama Islam mempunyai landasan secara yuridis formal dalam sistem bernegara dan berbangsa. Ada beberapa landasan yuridis yang dapat dijadikan rujukan bahwa pendidikan agama Islam merupakan subsistem pendidikan nasional.

Pertama, Pancasila sebagai dasar ideal bangsa dan negara, sekaligus sebagai dasar ideal pendidikan nasional Indonesia. Pancasila sebagai falsafah Negara dan dasar ideal Bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Nilai-nilai dasar yang termaktub dalam Pancasila yaitu sebagai berikut ini (1) Nilai Ketuhanan (2) Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima nilai dasar tersebut terutama nilai Ketuhanan merupakan nilai yang paling mendasar dan pertama dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Ini berarti bahwa pendidikan nilai moral yang berasal dari Tuhan menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam

konteks pendidikan nasional di Indonesia. Di sinilah, pendidikan agama Islam mempunyai peranan untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik di sekolah. Selain itu, keempat nilai dasar lainnya merupakan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam ajaran Pendidikan Agama Islam.¹³

Kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD'45) merupakan landasan konstitusional pendidikan nasional di Indonesia. Pada pasal 29 ayat (2) Negara menjamin dan melindungi setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia mengakui eksistensi lima agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 477/74054 tertanggal 18 November 1978). Pemerintah Indonesia memberikan ruang gerak yang jelas dan bebas untuk menumbuhkan keyakinan dari agama yang dipeluknya. Hal ini berarti bahwa konstitusi secara resmi dan pasti mengakui dan mengapresiasi serta penuh tanggungjawab untuk mengembangkan

nilai-nilai moral agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui instrumen pendidikan secara nasional.

Ketiga, Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan Pendidikan Nasional di Indonesia. Dengan landasan ini, status dan peranan Pendidikan Agama Islam dalam konteks pendidikan nasional semakin kuat. Pada pasal 12 bagian (1) undang-undang Sistem Pendidikan Nasional memberikan penekanan hak pengajaran Pendidikan Agama kepada peserta didik dan diajarkan oleh guru dan diajarkan oleh guru agama yang sesuai dengan agama peserta didik. Untuk memenuhi hak pendidikan agama peserta didik maka pada pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa 'kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan / kejuruaan dan muatan lokal. Ini berarti bahwa para guru Pendidikan Agama Islam mempunyai landasan yang kuat untuk

¹³ Moh. Muslih & Wan Hasmah Wan Mamat, *Pendekatan Pembelajaran Pendidikan*

Agama Islam Secara Komprehensif, dalam FORUM TARBIYAH Vol. 7, No. 1, Juni 2009, 14

mengembangkan proses pengajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah.¹⁴

D. Masyarakat Madani

Wacana masyarakat madani mulai populer sekitar awal tahun 90-an di Indonesia dan masih terdengar asing pada sebagian dari kita. Konsep ini awalnya berkembang di Barat, dan berakhir setelah lama terlupakan dalam perdebatan wacana sosial modern, dan kemudian mengalami revitalisasi terutama ketika Eropa timur dilanda gelombang reformasi di tahun-tahun pertengahan 80-an hingga 90-an. Mengenai wacana tentang masyarakat madani masih dalam perdebatan, namun beberapa kalangan ada yang berpendapat bahwa masyarakat madani adalah persamaan dari kata *civil society*.¹⁵

Civil Society sebagai sebuah konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri

kapitalis.¹⁶ Proses sejarah dari masyarakat Barat, perkembangannya bisa diruntut mulai dari Cecero sampai pada Antonio Gramsci dan De'Tocquville bahkan menurut Manfred Ridel, Cohen dan Arato serta M Dawam Raharjo, pada masa Aristoteles wacana *civil society* sudah dirumuskan sebagai system kenegaraan dengan menggunakan istilah *Koinonia Politike* yaitu sebuah komunitas politik tempat warga terlibat langsung pada percaturan ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan.

Konsep *Civil Society* kemudian dikembangkan oleh filosof John Locke dari istilah *Civillian Governmant* (pemerintahan sipil) yang berasal dari bukunya *Civilian Government* pada tahun 1960. Buku tersebut mempunyai misi menghidupkan pesan masyarakat dalam menghadapi kekuasaan- kekuasaan mutlak para raja dan hak istimewa para bangsawan.¹⁷

Locke membangun pemikiran otoritas umat untuk merealisasikan kemerdekaan dan kekuasaan elit yang memonopoli kekuasaan dan kekayaan

¹⁴ Moh. Muslih & Wan Hasmah Wan Mamat, *Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara Komprehensif*, hal. 14

¹⁵ Adi Suryadi Culla. *Masyarakat Madani ; Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, cet I, 3

¹⁶ PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi. HAM dan Masyarakat Madani*. Cet. I, 142.

¹⁷ Fahmi Huwaidi. *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*. Cet, 1 h. 295.

dalam misi pembentukan pemerintahan sipil. Semua itu dapat terwujud melalui demokrasi parlementer, yaitu keberadaan parlemen atau wakil adalah pengganti otoritas para raja. Sementara John Jack Rousseau dengan bukunya *The Social Contract* memaparkan tentang pemikiran otoritas rakyat dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara manusia dan kekuasaan dan pada intinya mempunyai tujuan yang sama dengan John Locke, yaitu mengajak manusia untuk ikut menentukan hari dan masa depannya serta menghancurkan monopoli yang dilakukan oleh kaum elit yang berkuasa dengan kepentingan manusia.¹⁸

Kesulitan dalam mencari padanan kata “Masyarakat Madani” dalam literatur bahasa Indonesia di sebabkan oleh hambatan psikologis untuk menggunakan istilah-istilah Arab-Islam dan tiadanya pengalaman empiris penerapan nilai-nilai madaniyah dalam tradisi kehidupan politik bangsa Indonesia akhirnya banyak orang yang memadankan istilah masyarakat madani dengan *civil society*, *societas civilis* (Romawi), atau *koinonia politike* (Yunani).¹⁹ Terjadinya pro dan

kontra terhadap pengistilahan *civil society* dan masyarakat madani merupakan hal yang menarik untuk dibahas sebagai landasan teori yang dapat digunakan untuk menentukan keobyekan konsep masyarakat madani.

Tokoh yang mewakili tidak setuju untuk memadukan *civil society* dengan masyarakat madani adalah Hikam, dengan alasan bahwa istilah masyarakat madani cenderung telah di kooptasi oleh Negara karena dipahami sebagai masyarakat ideal yang disponsori atau dibuat oleh Negara sebagaimana pernah terdengar istilah masyarakat pancasila dan istilah masyarakat madani secara khusus dipopulerkan oleh pemikir Islamis yang kemudian cenderung menjadi monopoli kalangan Islam. Sementara tokoh yang sepakat terhadap padanan *civil society* dengan masyarakat madani adalah Nurcholish Madjid, Dawam Raharjo, dan Bachtiar Efendi serta umumnya pemikir yang mempunyai latar belakang pendidikan ke-islaman modernitas-sekularis semisal Syafi'i Ma'arif, Komaruddin Hidayat, bahkan Amien Rais dalam pidato pengukuhan guru besarnya

¹⁸ Ibid, Hal. 296

¹⁹ Nurcholis Majid, *Masyarakat Tamadun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani*, Cet 1, vii.

yakni membahas kuasa, tuna-kuasa dan demokratisasi kekuasaan mendukung terwujudnya masyarakat madani di Indonesia.

Menurut Dawam Raharjo pengertian masyarakat madani mengacu kepada integrasi umat atau masyarakat, gambaran itu misalnya terlihat melalui wujud NU dan Muhammadiyah. Dalam konteks ini masyarakat madani lebih mengacu pada penciptaan peradaban yang mengacu kepada al- Din, al-Tamaddun atau al-madinah yang secara harfiah berarti kota, dengan demikian konsep masyarakat madani mengandung tiga hal yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota atau perkumpulan sebagai hasilnya. Meskipun demikian akan timbul interpretasi berbeda jika konsep itu diartikan luas sebagai masyarakat utama atau unggul (al-Khair al-ummah) yang bias berarti masyarakat madani dan bisa pula berarti Negara.²⁰

Konsep *civil society* di artikan sama sengan konsep masyarakat madani,

²⁰ Masyarakat utama adalah masyarakat yang lebih tinggi tingkat perkembangannya, yaitu masyarakat yang memiliki system kelembagaan dan mekanisme yang menjamin berlakunya upaya-upaya masyarakat itu sendiri untuk secara otonom mampu melaksanakan *amar ma'ruf nahi*

dimana sistem sosial yang ada dalam masyarakat madani di ambilkan dari sejarah Nabi Muhammad sebagai pemimpin ketika itu yang membangun peradaban tinggi dengan mendirikan Negara-Kota Madinah dan meletakkan dasar-dasar masyarakat madani dengan menggariskan ketentuan untuk hidup bersama dalam suatu dokumen yang di kenal dengan Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah).²¹ Idealisasi tatanan masyarakat Madinah ini didasarkan pada keberhasilan Nabi dalam mempraktekkan dan mewujudkan nilai-nilai keadilan, ekualitas, kebebasan, penegakan hukum dan jaminan terhadap kesejahteraan bagi semua warag serta perlindungan terhadap kaum yang lemah dan kelompok minoritas, walupun eksistensi masyarakat madani hanya sebentar tetapi secara historis memberikan makna yang penting sebagai teladan bagi perwujudan masyarakat yang ideal di kemudian hari untuk membangun tatanan kehidupan yang sama, maka dari itu tatanan masyarakat Madinah yang telah dibangun

munkar dan memelihara iman. Lihat M Dawam Raharjo. *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*. Cet 1. 451.

²¹ Akram Dhiyauddin Umari. *Masyarakat Madani ; Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, 108-109.

oleh Nabi secara kualitatif dipandang oleh sebagian intelektual muslim sejajar dengan konsep *civil society*.

Menurut Nurcholish Madjid, kata "Madinah" berasal dari bahasa Arab "Madaniyah" yang berarti peradaban. Karena itu masyarakat madani berasosiasi pada masyarakat yang beradab. Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa istilah masyarakat madani merujuk kepada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nabi di Madinah yaitu daerah yang bernama Yastrib yang kemudian di ubah menjadi Madinah yang pada hakekatnya pernyataan niat untuk mendirikan dan membangun masyarakat yang berperadaban berlandaskan ajaran Islam dan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di kota itu. ciri-ciri mendasar masyarakat yang dibangun oleh Nabi adalah *egaliterisme*, penghargaan terhadap orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan dan ras), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme dan musyawarah.²²

Istilah masyarakat madani di

Indonesia diperkenalkan oleh Dato Anwar Ibrahim ketika berkunjung ke Indonesia, dalam ceramahnya pada sinposium nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara festival Istiqlal 26 September 1995, memperkenalkan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan *civil society*. Lebih lanjut Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang di asaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Penerjemahan *civil society* menjadi masyarakat madani didasari oleh konsep kota Ilahi, kota peradaban atau masyarakat kota dan di sisi lain pemaknaan itu juga dilandasi oleh konsep al- Mujtama' al-Madani yang dikenalkan oleh Naqwib al-Attas.

Sementara itu, umumnya cendekiawan muslim memandang istilah madani berasal dari kata *madaniah* (Arab) yang berarti peradaban, sehingga masyarakat madani mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial. Bahkan

²² Nurcholish Madjid. *Menju Masyarakat Madani : Jurnal Ulumul Qur'an*. No 2/VII/1996, 51-55.

dapat dimaknai lebih dari sekadar gerakan pro-demokrasi, karena dia mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan beradab. Dalam konsep ini, terjadi integrasi umat atau masyarakat yang mengacu pada penciptaan peradaban yang berdasarkan kepada *al-dīn, al-tamāddun* atau *al-madīnah* yang secara harfiah berarti kota, dengan demikian konsep masyarakat madani mengandung tiga hal yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota atau perkumpulan sebagai hasilnya.²³

Berdasarkan akar kata tersebut, dapat diasumsikan bahwa istilah masyarakat madani merujuk kepada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad saw di daerah yang bernama Yasrib kemudian diubah menjadi Madinah sebagai perwujudan cita-cita untuk mendirikan dan membangun masyarakat ideal. Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin ketika itu membangun peradaban tinggi dengan mendirikan Negara- Kota Madinah dan meletakkan dasar-dasar masyarakat madani dengan ketentuan untuk hidup bersama dalam

suatu dokumen yang di kenal dengan Piagam Madinah. Idealisasi tatanan masyarakat Madinah ini didasarkan pada keberhasilan Nabi Muhammad saw dalam mempraktikkan dan mewujudkan nilai-nilai keadilan, ekualitas, demokrasi, toleransi, kebebasan, penegakan hukum, dan jaminan terhadap tawanan perang. Ciri-ciri mendasar masyarakat yang dibangun oleh Nabi adalah egaliterisme, penghargaan terhadap orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan dan ras), keterbukaan, partisipasi seluruh anggota masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, dan musyawarah.

Berdasarkan paparan para ahli tersebut, tampak jelas bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, menerima berbagai macam pandangan, maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan bagi semua warga, perlindungan terhadap kaum yang lemah (kelompok minoritas), serta terwujudnya masyarakat yang berkualitas (bermoral/berakhlak). Masyarakat

²³ Muh Arsyad, Bahaking Rama, Urgensi Pendidikan Islam dan Interaksi Sosial Masyarakat

Soppeng; Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani, Al-Musannif; Journal of Islamic Education and Teacher Treaning, Vol. 1, No. 1. 2019, hal. 1-8.

madani merupakan konsep tentang masyarakat yang mampu memajukan dirinya melalui aktivitas mandiri berdasarkan budaya, agama, dan perkembangan zaman dengan dukungan pemerintah.

Nabi Muhammad memberikan teladan ke arah pembentukan masyarakat yang berperadaban tersebut. Setelah perjuangan di kota Makkah tidak menunjukkan hasil yang berarti, Allah telah menunjuk sebuah kota kecil, yang selanjutnya kita kenal dengan Madinah, untuk dijadikan basis perjuangan menuju masyarakat peradaban yang dicita-citakan. Di kota itu Nabi meletakkan dasar-dasar masyarakat madani yakni kebebasan. Untuk meraih kebebasan, khususnya di bidang agama, ekonomi, sosial dan politik, Nabi diijinkan untuk memperkuat diri dengan membangun kekuatan bersenjata untuk melawan musuh peradaban. Hasil dari proses itu dalam sepuluh tahun, beliau berhasil membangun sebuah tatanan masyarakat yang berkeadilan, terbuka dan demokratis dengan dilandasi ketakwaan dan ketaatan kepada ajaran Islam. Salah satu yang utama dalam tatanan masyarakat ini adalah pada penekanan pada komunikasi yang menyandarkan diri pada konsep

egalitarian pada tataran horizontal dan konsep ketakwaan pada tataran vertikal.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki makna ganda yaitu demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, aspirasi, motivasi, partisipasi, konsistensi, komparasi, koordinasi, simplifikasi, sinkronisasi, integrasi, emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Perbedaan yang tampak jelas adalah *civil society* tidak mengaitkan prinsip tatanannya pada agama tertentu, sedangkan masyarakat madani jelas mengacu pada agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW.

E. Ciri-ciri Masyarakat Madani

Ciri-ciri *civil society* dimaksudkan di sini adalah untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana *civil society* diperlukan persyaratan-persyaratan yang menjadi nilai universal dalam penegakan *civil society*. Prasyarat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain atau hanya mengambil salah satunya saja, melainkan merupakan satu kesatuan yang integral yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi *civil*

society.

1. Free Public Sphere

Yang dimaksud dengan *free public sphere* adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi wacana dan praktis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Lebih lanjut dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan *civil society* dalam sebuah tatanan masyarakat, maka *free public sphere* menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan menafikan adanya ruang publik yang bebas dalam tatanan *civil society*, maka akan memungkinkan terjadinya

pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.

2. Demokratis

Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana *civil society*, di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Prasyarat demokratis ini banyak dikemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena *civil society*. Bahkan demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan *civil society*. Penekanan demokrasi di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

3. Toleran

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam *civil society* untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. Toleransi menurut Nurcholish Madjid, merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang enak antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar.

Azyumardi Azra pun menyebutkan bahwa masyarakat madani lebih dari sekadar gerakan-gerakan prodemokrasi. Masyarakat madani juga mengacu ke kehidupan yang berkualitas dan bertamaddun (*civility*). Civilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-

pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.²⁴

4. Pluralisme

Sebagai sebuah prasyarat penegakan *civil society*, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.

Menurut Nurcholis Madjid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutnya adalah pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui

²⁴ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta, dan Tantangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*).

Lebih lanjut Nurcholish mengatakan bahwa sikap penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yakni masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan *design*-Nya untuk umat manusia. Jadi tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dan sebangun dalam segala segi.

5. Keadilan Sosial (Sosial Justice)

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).²⁵

Adapun sistem sosial madani menurut Nabi Muhammad SAW, maka ditemukan ciri unggul, yakni kesetaraan, *istiqomah*, mengutamakan partisipasi, dan demokratisasi. Konsep tersebut dapat diaplikasikan di Indonesia tanpa mengusik kepentingan dan keyakinan kelompok minoritas. Mengenai hal yang terakhir ini Nabi SAW telah memberi contoh yang tepat, bagaimana sebaiknya memperlakukan kelompok minoritas ini. Berdasarkan kajian di atas masyarakat madani pada dasarnya adalah sebuah komunitas dimana keadilan dan kesetaraan menjadi fundamennya. Muara dari pada itu adalah pada demokratisasi, yang dibentuk sebagai akibat adanya partisipasi nyata anggota kelompok masyarakat. Sementara hukum diposisikan sebagai satu-satunya alat pengendalian dan pengawasan perilaku masyarakat. Dari definisi itu maka karakteristik masyarakat madani, adalah demokratisasi, partisipasi sosial, dan supremasi hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian semakin jelas bahwa masyarakat madani merupakan bentuk sinergitas dari pengakuan hak-

²⁵ Farid Wajdi Ibrahim, *Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia Melalui Civic*

Education, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Agustus, 2012, Vol. XIII, No. 1.

hak untuk mengembangkan demokrasi yang didasari oleh kesiapan dan pengakuan pada partisipasi rakyat, dimana dalam implementasi kehidupan peran hukum strategis sebagai alat pengendalian dan pengawasan dalam masyarakat.

F. Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Masyarakat Madani

Sebelum membentuk masyarakat madani, terlebih dahulu perlu memetakan peran pendidikan agama Islam dengan analisis SWOT, dengan mengetahui peluang dan tantangannya, serta kekuatan dan kelemahannya, pendidikan Islam dapat memposisikan diri secara tepat dalam pergaulan sosio kultural. Berikut ini akan dipaparkan sejumlah kelemahan yang sekaligus merupakan tantangan yang harus dibenahi oleh pendidikan Islam antara lain sebagai berikut: a) citra lembaga dan kualitas pendidikan Islam *relative* rendah, sebagai sebuah kenyataan bahwa dalam ranking kelulusan lembaga pendidikan Islam umumnya berada didalam urutan dibawah sekolah umum, b) kualitas dan kuantitas guru yang belum memadai, yang merupakan kunci keberhasilan dalam pendidikan. Karena itu, apabila guru kualitasnya rendah dan

rasio siswa tidak memadai, maka out put pendidikannya dengan sendirinya akan rendah pula, c) gaji guru secara umum masih kecil, d) tuntutan kompetensi dan kompetensi yang semakin meningkat, e) harapan masyarakat terhadap pendidikan Islam agar dapat melahirkan orang-orang yang intelek, tetapi alim dan orang-orang alim yang intelek, harapan ini yang harus dijawab dengan sungguh-sungguh dan terus menerus mengupayakan kualitas lembaga pendidikan Islam yang terus meningkat.

Meskipun didapati kelemahan dan tantangan yang dihadapi lembaga-lembaga pendidikan Islam cukup berat, tetapi jika kita mengamati secara seksama terdapat sejumlah alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa peluang lembaga pendidikan Islam dimasa mendatang tetap cukup besar, bahkan mungkin semakin besar. Peluang tersebut dimungkinkan dan didukung oleh sejumlah kondisi sebagai berikut: 1) potret masyarakat Indonesia adalah agamis. Kondisi semacam ini merupakan pondasi yang cukup kokoh bagi kehidupan lembaga pendidikan Islam, karena keinginan masyarakat yang cukup kuat untuk memiliki anak yang selain berilmu juga taat beragama. 2) Meningkatkan

kesadaran beragama dikalangan masyarakat yang semula dikategorikan sebagai Islam formal. Peningkatan kesadaran beragama tersebut dengan sendirinya diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan Islam bagi anak-anak mereka. 3) Pendidikan Islam, posisi madrasah yang semakin mantap seiring dengan lahirnya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pendidikan seperti madrasah di akui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. 4) Keimanan dan ketaqwaan semakin menempati posisi yang setrategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, setiap langkah pembangunan bangsa harus dijiwai oleh nilai-nilai agama. 5) Meningkatnya status sosial-politik kalangan santri pada masa ini banyak sekali elit politik, birokrat maupun tokoh masyarakat yang berasal dari kalangan santri. Hal ini secara tidak langsung juga berdampak positif bagi meningkatnya perhatian dan penghargaan terhadap lembaga pendidikan Islam.²⁶ 6) Meningkatnya kualitas pendidikan Islam,

seperti madrasah dan sekolah Islam berkualitas rendah, namun beberapa madrasah ternyata mengungguli lembaga pendidikan atau sekolah umum.

Melihat tantangan dan peluang yang dimiliki pendidikan Islam yakni dalam rangka mempersiapkan peserta didiknya menghadapi tantangan yang semakin berat pada milenium ketiga ini, adalah melakukan reformasi pendidikan Islam sedemikian rupa sehingga menu pendidikan Islam yang diberikan mampu menunjang proses reproduksi dan revitalisasi. Lebih lanjut menurut Baharudin dikatakan bahwa reformasi pendidikan yang dilakukan dalam rangka menyiapkan diri di milenium ketiga ini meliputi beberapa hal: a) agama yang disajikan dalam proses pendidikan harus lebih lebih menekankan kepada kesalehan aktual bukan semata-mata kesalehan ritual. Hal ini penting ditekankan mengingat millennium ketiga akan semakin diwarnai selain oleh trust juga oleh kompetisi, b) pendidikan Islam harus mempunyai generasi terdidik yang pluralis yang mampu menghadapi kemajemukan baik internal maupun

²⁶ Fauzi, *Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Melalui Kepemimpinan Spiritual* :

Suatu Telaah Diskursif. Empirisma STAIN Kediri, 24(2), 155-167.

eksternal. c) pengembangan sifat pluralis tersebut harus merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya besar mewujudkan masyarakat madani yang demokratis, terbuka dan beradab yang menghargai perbedaan pendapat. Justru selalu diupayakan sebagai rahmat bukan sebagai laknat. d) masyarakat madani yang diharapkan adalah masyarakat yang penuh percaya diri, memiliki kemandirian dan kreatifitas yang tinggi dalam memecahkan masalah yang dihadapi, e) pendidikan yang dilakukan harus menyiapkan generasi yang siap berpartisipasi aktif dalam interaksi global, hal ini pengetahuan dan keterampilan yang diberikan harus memiliki relevansi yang kuat dengan trend globalisasi.

Selain memiliki tantangan dan peluang, pendidikan Islam juga harus memperhatikan beberapa hal lain diantaranya yaitu: *Pertama*, peningkatan mutu sumber daya manusia, diantara tuntutan internal dan tantangan eksternal, maka keunggulan yang mutlak dimiliki oleh peserta didik adalah penguasaan atas sains dan teknologi dan keunggulan kualitas sumber daya manusia. *Kedua*, menyiapkan kurikulum yang handal yang berwawasan masa kini dan masa depan. Kurikulum ini diharapkan dapat

menciptakan manusia-manusia yang memiliki kemampuan yang berkualitas dan memiliki keterampilan dan kecakapan dalam hidup. *Ketiga*, sarana dan prasarana yang memadai dan merupakan unsur penting yang sangat menunjang bagi kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana akademik mutlak perlu, baik berupa perpustakaan, gedung, pembelajaran, dan lain sebagainya. *Keempat*, mendekonstruksi metode dan manajemen. Metodologi dan manajemen yang selama ini kita pakai harus dirubah dan dibangun lagi yang baru, yang dapat membawa semangat dan konsep baru sehingga menghasilkan tujuan tersebut sesuai dengan masyarakat modern. *Kelima*, pengembangan ilmu sosial profetik. Ilmu sosial profetik adalah ilmu sosial yang dalam pengembangan ilmu, didasarkan dengan konsep keilahian. Dengan Ilmu sosial profetik yang dibangun dari ajaran Islam, kita tidak perlu takut atau khawatir terhadap dominasi sains barat dan arus globalisasi yang terjadi saat ini.

Senada dengan pendapat tersebut di atas yaitu dalam rangka menghadapi tantangan zaman ini pendidikan Islam harus melaksanakan pendidikan tetap dalam pilarnya. Pilar-pilar pendidikan

Islam tersebut dibangun atas dasar tauhid, hubungan yang harmonis antara Allah SWT, manusia, dan alam, berorientasi pada moralitas Islam dan akhlak mulia, kesucian manusia dan menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Karena dalam pandangan Islam ilmu, amal, dan akhlak hendaknya berintikan dan menimbulkan iman dalam diri seseorang. Rasulullah saw bersabda bahwa: *“Baragsiapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah imannya, maka baginya tidak tambah apapun disisi Allah swt. Kecuali semakin jauh darinya”*. Dengan demikian, domain ilmu, amal, dan akhlak diatas amsih perlu diteruskan lagi dengan domain iman yang merupakan inti dari pendidikan Islam. Domain iman ini merupakan manifestasi dari nilai spritualitas dan emosional manusia yang sadar akan makna dirinya dalam hubungannya dengan Allah SWT, orang lain, lingkungan.²⁷

Mencermati berbagai tantangan di atas, maka tidaklah mustahil pendidikan Islam dapat memainkan peran penting dan strategis dalam mewujudkan masyarakat madani. Karena bagaimanapun pendidikan Islam

setidaknya memiliki dua misi yang harus diemban, yaitu *Pertama* Menanamkan pemahaman Islam secara komperhensif agar peserta didik mampu mengetahui ilmu-ilmu Islam sekaligus mempunyai kesadaran untuk mengamalkannya. Pendidikan Islam tidak semata-mata mengajarkan pengetahuan Islam secara teoritik saja sehingga hanya menghasilkan seorang cendikiawan Muslim, tetapi Islam juga menekankan pada pembentukan sikap dan prilaku yang islami dengan membentuk peserta didik menjadi Insan Kamil. *Kedua*, memberikan bekal kepada peserta didik agar nantinya dapat berkiprah dalam kehidupan masyarakat, serta *survive* menghadapi berbagai tantangan yang semakin tidak terkendali. Dengan dua misi di atas, maka tidaklah berlebihan bahwa pendidikan Islam memiliki peran penting dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kualitas intelektual yang tinggi, kepribadian yang tangguh, kreatifitas dan keterampilan yang memadai, melainkan juga yang sangat penting dan harus menjadi dasar yaitu memiliki akhlak dan budi pekerti serta

²⁷ Abd. Rahman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam Paradigma baru pendidikan*

Hadhari berbasis Integratif-Interkonektif, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

iman yang kokoh dan kuat sehingga upaya dalam mewujudkan masyarakat madani bukan sekedar slogan belaka.

Konsep pendidikan adalah yang telah ditawarkan dalam masyarakat madani adalah pendidikan yang idealistik yaitu suatu konsep pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik yang berdasarkan pada budaya yang kuat. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Pertama : Konsep Pendidikan Integralistik; Yaitu pendidikan yang diorientasikan pada komponen kehidupan meliputi orientasi Robbaniyyah (ketuhanan), Insaniyah (kemanusiaan) dan Alamiyah. Sebagai sesuatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan yang baik serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai pribadi jasmani, rohani, intelektual, perasaan, dan individu sosial yang akan menghasilkan manusia yang memiliki integritas yang tinggi.

Kedua : Konsep Pendidikan Humanistik; Pendidikan yang berorientasi dengan memandang manusia sebagai manusia yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrahnya, manusia makhluk hidup yang harus mampu melangsungkan dan mempertahankan hidupnya. Posisi pendidikan dapat menghasilkan manusia

yang manusiawi, mengembangkan dan membentuk manusia yang berfikir, merasa dan berkemauan untuk bertindak sesuai dengan nilai luhur kemanusiaan.

Ketiga : Konsep Pendidikan Pragmatik; Pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan dan mengembangkan hidupnya peka terhadap masalah sosial kemanusiaan.

Keempat : Pendidikan yang Berakar dari Budaya; Yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar sejarah baik secara kemanusiaan umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa. Pendidikan ini diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri dan percaya pada diri sendiri untuk membangun peradaban berdasarkan budaya.

Dengan konsep pendidikan di atas akhirnya dapat dijadikan desain model pendidikan Islam untuk membangun masyarakat madani. Dalam bentuk operasionalnya sebagai berikut:

1. Mendesain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain. Dengan

demikian visi misi dan tujuan pendidikan, kurikulum, materi pembelajaran, metode pembelajaran, manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan tuntunan zaman.

2. Model pendidikan Islam yang tetap mengkhususkan pada desain pendidikan keagamaan, yaitu benar-benar sesuai dengan konsep-konsep Islam.
3. Model Pendidikan Agama Islam tidak hanya dilaksanakan di sekolah formal tetapi juga di luar sekolah seperti di lingkungan keluarga masyarakat sehingga pendidikan agama dapat ditanamkan dan disosialisasikan yang menjadi kebutuhan peserta didik, akhirnya pendidikan agama Islam bukan lagi berupa pengetahuan yang dihafal tetapi menjadi kebutuhan dan perilaku aktual.
4. Desain pendidikan diarahkan pada dua dimensi. Dimensi itu meliputi; (a) Dimensi dialektika (horisontal) pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia

dalam hubungannya dengan alam/ lingkungan sosialnya, akhirnya manusia mampu mengatasi tantangan dan kendala melalui pengembangan Iptek. (b) Dimensi vertikal, hal ini pendidikan sebagai jembatan dalam memahami fenomena dan misteri kehidupan yang abadi.

Keempat model pendidikan Islam di atas perlu diupayakan untuk membangun masyarakat madani. Dengan demikian apapun model pendidikan Islam yang ditawarkan untuk membangun masyarakat madani pada dasarnya harus berfungsi untuk memberi kaitan antara peserta didik dengan nilai-nilai ilahiyah, pengetahuan, dan keterampilan. Nilai-nilai demokrasi dan sosial cultural harus berfungsi untuk memberi kaitan secara operasional antara peserta didik dengan masyarakatnya.

PENUTUP

Dengan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan agama, maka bangsa dan negara terus melakukan inovasi-inovasi demi kemajuan bangsanya. Hal ini pastinya berpengaruh

pada ragam budaya dan pola pikir masyarakatnya. Masyarakat semula *primitive*, awam, gagap teknologi mulai berubah menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi dengan kata lain bisa berubah menjadi masyarakat madani. Membentuk masyarakat madani tidaklah mudah, karena hal ini berkaitan dengan kehidupan sosio cultural masyarakat yang semula sudah terbentuk, meskipun terdapat beberapa kelemahan yang didapati oleh pendidikan Islam dalam pengupayakannya, melalui proses akhirnya masyarakat madani tersebut bisa terwujud. Melalui, pendidikan-pendidikan Islam baik di lembaga formal maupun non formal, lembaga-lembaga majlis ta'lim yang juga ikut berpartisipasi dalam melakukan perubahan pola pikir dan perilaku, pendidikan karakter sebagai penguat dalam pembentukan masyarakat madani juga sangat besar perannya dimana penguatan-penguatan tersebut dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan tingkah laku dan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang dianut oleh warga masyarakat.

Konsep-konsep pendidikan Islam sebenarnya sudah menciptakan kemajuan peradaban Islam. Karena peradaban Islam

dibangun oleh pendidikan Islam. Jadi membangun masyarakat yang madani harus dimulai dengan membangun pemikiran umat Islam yang diselenggarakan melalui pendidikan yang berbasis pada konsep-konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam senantiasa terus berkembang dan menghendaki pembaharuan yang disesuaikan dengan irama perkembangan dan kemajuan peradaban serta persoalan yang dihadapi manusia. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian terhadap persoalan filosofis, visi misi, tujuan, kurikulum, serta metodologi dan operasional pada lembaga pendidikan dalam membangun masyarakat madani.

Keberhasilan pembentukan masyarakat madani bisa dilihat dengan adanya toleransi agama yang terjalin, saling hormat menghormati dg keberagaman agama dan budaya di Indonesia, saling tolong menolong, menjunjung tinggi harkat martabat dan hak kewajiban, masyarakat yang semula *primitive* dan awam mulai berubah menjadi masyarakat yang melek teknologi dan berilmu tinggi.

REFERENSI

- Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta, dan Tantangan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Abd. Rahman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam Paradigma baru pendidikan Hadhari berbasis Integratif-Interkonektif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Akram Dhiyauddin Umari. *Masyarakat Madani ; Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*.
- Adi Suryadi Culla. *Masyarakat Madani ; Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*.
- Ahmad Ghani, *Pendidikan Akhlak Mewujudkan Masyarakat Madani*, Jurnal Pendidikan Islam, Al-Tadzkiyyah, Vol, 6, November 2015, P. ISSN ; 20869118.
- Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : PT : Sinar Grafika Offset, 2010
- Fathul Jannah, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal Dinamika Ilmu, Vol. 13.No. 2, Desember 2013.
- Fahmi Huwaidi. *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*.
- Farid Wajdi Ibrahim, *Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia Melalui Civic Education*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Agustus, 2012, Vol. XIII, No. 1.
- Fauzi, *Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Melalui Kepemimpinan Spiritual: Suatu Telaah Diskursif. Empirisma STAIN Kediri*.
- Hasan Baharun and Robiatul Awwaliyah, 'Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam', *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 5.1, 2018
- Hamzah Junaid, *Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional)*, Sulesana Vol. 7 No. 2, 2012
- Hasan Baharun, *Pengembangan Kurikulum : Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI)*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017
- Ismatul Izzah, *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Masyarakat Madani*, Jurnal Pedagogik; Vol. 05, No. 01. Januari-Juni 2018. ISSN ; 2354-7960; E-ISSN ; 2528-5793. <https://ejournal.unuja.ac.id/index/php/pedagogok>
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002
- Muh Arsyad, Bahaking Rama, *Urgensi Pendidikan Islam dan Interaksi Sosial Masyarakat Soppeng; Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani*, Al-Musannif; Journal of Islamic Education and Teacher Treaning, Vol. 1, No. 1. 2019
- Moh. Muslih & Wan Hasmah Wan Mamat, *Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara Komprehensif*, dalam FORUM TARBIYAH Vol. 7, No. 1, Juni 2009
- Moh. Muslih & Wan Hasmah Wan Mamat, *Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara Komprehensif*
- Nurcholish Madjid. *Menju Masyarakat Madani : Jurnal Ulumul Qur'an*. No 2/VII/1996

Nurcholis Majid, *Masyarakat Tamadun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani*

Omar Mohammad At-toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta : PT : Bulan Bintang 1979

PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi. HAM dan Masyarakat Madani*

Rubino Rubiyanto, dkk, *Landasan Pendidikan*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2003

Robiatul Awwaliyah dan Hasan Baharun, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional; Telaah Epistemologi terhadap Problematika Pendidikan Islam*, *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, VOL 19, NO. 1, Agustus, 2018

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Bina Usaha, 1993

Umar Tirtarahardja dan S,L,La Solo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008

Zamroni Hasan Baharun, *Manajemen Mutu Pendidikan : Ikhtiar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Pendekatan Balanced Scorecard*, Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017